

Peran sektor ekonomi dan kependudukan dalam pembangunan wilayah Kabupaten Cilacap

The role of the economic and demography sector in the regional development of Cilacap Regency

N Hanifah¹ dan I Buchori¹

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Corresponding author's email: hanifahh1@gmail.com

Abstrak. Kabupaten Cilacap menempati peringkat kedua tingkat Provinsi Jawa Tengah dalam kontribusi PDRB dibawah Kota Semarang pada tahun 2018. PDRB Kabupaten Cilacap tahun 2018 sebesar 109.753.607,77 juta rupiah. Kabupaten Cilacap memiliki potensi sektor pertambangan dan industri. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis potensi ekonomi dan kependudukan untuk mengetahui perannya dalam pembangunan wilayah Kabupaten Cilacap. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis LQ dan *shift share*. Hasil analisis menunjukkan bahwa kabupaten Cilacap memiliki dua sektor basis yaitu sektor pertambangan dan industri pengolahan. Perekonomian yang menjadi sektor prioritas dalam hal penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kedepannya, adalah sektor pertambangan dan penggalian serta informasi dan komunikasi. Sektor kependudukan meliputi kualitas SDM memiliki peran dalam penyediaan tenaga kerja dibidang industri di Kabupaten Cilacap. Integrasi sektor kependudukan dalam perencanaan pembangunan dengan peran penduduk sebagai penggerak dan objek pembangunan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduk Kabupaten Cilacap. Dari hasil penelitian ini, Kabupaten Cilacap perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sektor pertambangan dan industri pengolahan.

Kata Kunci: Kependudukan; Pembangunan Wilayah; Potensi Ekonomi

Abstract. In 2018, the Cilacap Regency was ranked second in Central Java Province for GRDP contribution after Semarang City. The Cilacap Regency contributed IDR 109,753,607.77 million to the GDRP. The mining and industrial sectors have potential in the Cilacap Regency. The purpose of this research is to examine the economic and population potential, as well as their role in the development of the Cilacap Regency. The analysis of LQ and shift share was used in this study as the analytical method. According to the findings, Cilacap Regency has two primary industries: mining and manufacturing. Mining and quarrying, as well as information and communication, become priority sectors in planning for future development. The population sector, including the quality of human resources, plays a role in providing labor in the Cilacap Regency's industrial sector. The incorporation of the population sector in development planning, with the population serving as the driving force and the object of development, will improve the well-being of residents in the Cilacap Regency. Thus, human resources development, specifically to support the mining and manufacturing industries, is fundamental to develop Cilacap Regency.

Keywords: Economic Potential; Population; Regional Development

1. Pendahuluan

Pembangunan daerah merupakan indikator yang sangat menentukan dari keberhasilan pembangunan nasional. Komponen pertumbuhan nasional mengukur potensi perubahan dalam skala lokal dengan asumsi perekonomian daerah sama dengan nasional [1]. Keberhasilan pembangunan daerah merupakan hasil dari pemberdayaan potensi masing-masing daerah. Dengan konsep otonomi daerah yang menitikberatkan pada pembangunan untuk meningkatkan motivasi daerah dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi diharapkan masing-masing daerah mampu meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan serta mengelola sumber daya yang dimiliki. Salah satu faktor keberhasilan dari otonomi daerah adalah kebijakan pembangunan yang mengangkat karakteristik khas daerah melalui pemberdayaan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya alam secara lokal [2].

Pembangunan merupakan transformasi dalam arti perubahan struktural, dimana perubahan struktur ekonomi masyarakat termasuk perubahan saldo yang melekat pada kegiatan ekonomi dasar dan bentuk struktur ekonomi [3]. Sedangkan pembangunan ekonomi dalam pengertiannya yang terbatas, yaitu peningkatan produksi dan pendapatan, dapat berlangsung tanpa adanya pembangunan yang terwujud. Produksi merupakan produk suatu daerah yang memiliki nilai ekonomi yang nantinya dapat dijual menjadi pendapatan daerah. Di sisi lain, pembangunan ekonomi dalam pengertian yang luas haruslah mencakup pertumbuhan (sebagai ciri utama dalam pembangunan proses). Hal ini terlihat dari laju pertumbuhan penduduk yang semakin besar dan membutuhkan pembangunan yang lebih untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perkembangan aktivitas ekonomi regional yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa dan meningkatnya

kemakmuran masyarakat [3]. Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh pemerintah yang berperan dalam perencanaan pembangunan, kerjasama regional dan profesionalisme [4]. Efek pertumbuhan nasional menunjukkan pertumbuhan lapangan kerja yang akan terjadi jika sebuah sektor dalam ekonomi regional atau lokal telah tumbuh pada tingkat yang sama dengan ekonomi nasional [5].

Tingkat kemakmuran antara satu wilayah dengan wilayah lainnya memiliki perbedaan. Faktor utama yang membedakan kemakmuran tersebut diantaranya adalah struktur ekonominya [6]. Struktur ekonomi merupakan masing-masing sektor dalam perekonomian baik menurut lapangan usaha maupun terbagi dalam sektor primer, sekunder dan tersier dengan komposisi peranan masing-masing. Struktur ekonomi setiap daerah berbeda tergantung pada perkembangan ekonomi masing-masing baik daerah maju maupun tertinggal [7].

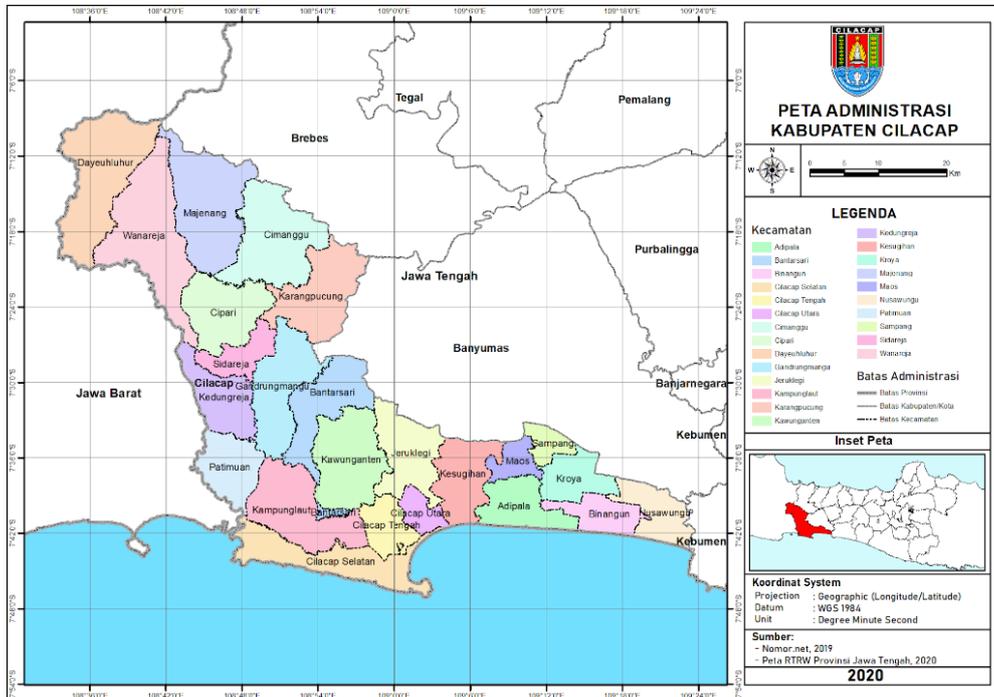
Peningkatan kemakmuran suatu wilayah tergantung kepada usaha daerah untuk menghasilkan barang dan jasa, serta usaha-usaha pembangunan lainnya yang diperlukan. Tujuan pembangunan yang ingin dicapai antara lain adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah yang mapan [8]. Termasuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Ketimpangan antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah yang cukup besar di setiap kota/kabupaten masih dijumpai di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terjadi diantaranya karena perbedaan kondisi geografis dan potensi daerah yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Setiap daerah harus tepat dalam mengambil kebijakan dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki agar pertumbuhan ekonomi meningkat dan tidak tertinggal dari daerah lain. Pembangunan wilayah berbasis potensi ekonomi unggulan juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung daya saing lokal dan mendukung perekonomian terbesar di Kabupaten Cilacap. Keseimbangan wilayah menjadi peranan penting dalam pembangunan secara menyeluruh, guna mengurangi ketimpangan wilayah [9].

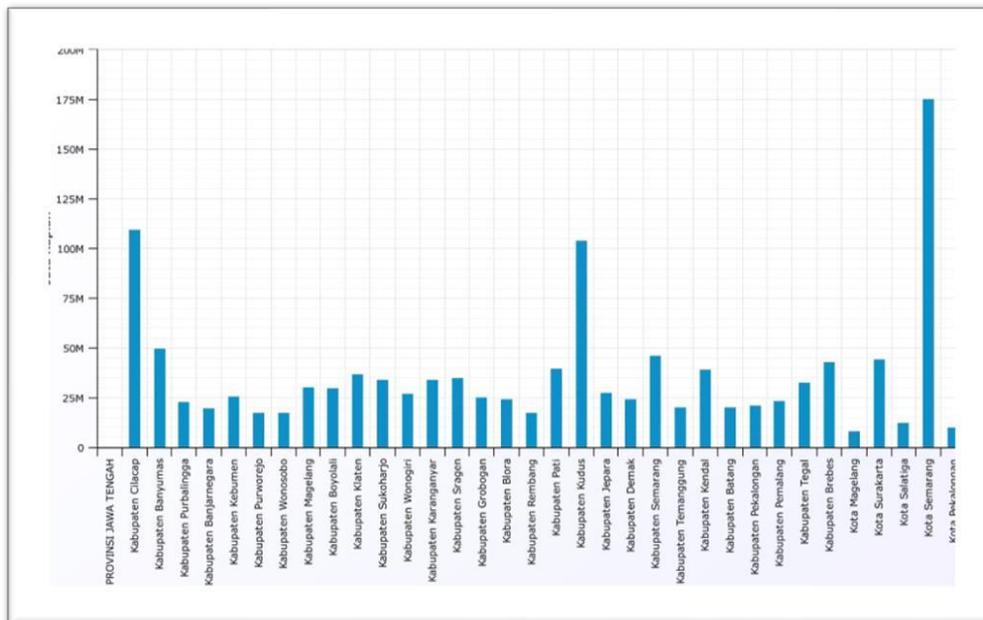
Kabupaten Cilacap adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah 225.361 hektar dimana luas tersebut termasuk Pulau Nusakambangan (11.511 hektar). Kabupaten Cilacap memiliki topografi yang beragam, dan memiliki kondisi rata-rata merupakan dataran rendah. Secara administratif Kabupaten Cilacap terbagi menjadi 24 kecamatan dan terbagi menjadi 269 desa dan 15 kelurahan. Penggunaan lahannya terbagi menjadi lahan sawah 30,27 % (64.738 ha), lahan bukan sawah 49,84 % (106.575 ha), dan lahan bukan pertanian sebesar 19,89 % (42.537 ha). Kabupaten Cilacap memiliki kecamatan terluas yaitu Kecamatan Wanareja (18.973 ha), sedangkan Kecamatan Dayeuhluhur merupakan kecamatan yang memiliki jarak terjauh dari ibukota kabupaten yaitu berjarak 107 km. Gambar 1 menunjukkan peta administratif Kabupaten Cilacap.

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kondisi perekonomian suatu wilayah untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Arah kecenderungan struktur ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari peranan masing-masing sektor terhadap

PDRB suatu daerah. Grafik kontribusi perekonomian setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat digunakan untuk mengetahui kontribusi PDRB Kabupaten Cilacap (lihat Gambar 2).



Gambar 1. Peta administrasi Kabupaten Cilacap.



Gambar 2. PDRB tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2018 [10].

Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui bahwa Kabupaten Cilacap menempati peringkat kedua di Provinsi Jawa Tengah dalam kontribusi PDRB di bawah Kota Semarang pada tahun 2018. PDRB Kabupaten Cilacap tahun 2018 sebesar 109.753.607,77 juta rupiah. Kabupaten Cilacap memiliki sektor unggulan di bidang pertambangan dan industri serta memiliki sektor potensial untuk dikembangkan. Sektor-sektor inilah yang akan menjadi perhatian dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan ekonomi Kabupaten Cilacap.

Faktor utama yang mempengaruhi pembangunan adalah sumber daya manusia, yang juga didukung oleh sumber daya alam, iptek, dan kapasitas produksi yang ada di daerah tersebut. Suksesnya pembangunan memerlukan potensi sumber daya manusia dengan usia produktif, sehat, dan inovatif yang didukung oleh peningkatan kapasitas dan pendidikan serta teknologi untuk meningkatkan produktivitas [7,11]. Kualitas SDM dan jumlah penduduk yang mencapai 1,9 juta jiwa juga merupakan potensi dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Cilacap. Sektor kependudukan yang meliputi pertumbuhan penduduk merupakan objek dan subjek dari pembangunan selain itu penduduk merupakan penyedia angkatan kerja sebagai modal pembangunan. Berdasarkan hal tersebut peran kependudukan perlu diteliti dalam pembangunan wilayah Kabupaten Cilacap.

Upaya pembangunan terpadu dilakukan dengan mengidentifikasi sektor unggulan atau sektor dasar. Sektor unggulan adalah sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Penentuan sektor unggulan didasarkan pada dua hal, pertama potensi ekonomi daerah terkait dengan kontribusi sektor tersebut terhadap bentuk skala dan pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin besar peran sektor tersebut, maka semakin besar pula kemampuan untuk meningkatkan perekonomian [12].

Beberapa penelitian telah melakukan analisis potensi ekonomi dengan tujuan untuk mengetahui sektor-sektor unggulan dan potensial [13–15]. Analisis potensi pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cilacap menunjukkan bahwa kawasan barat memiliki pusat di Kecamatan Majenang, kawasan tengah di Kecamatan Gandrungmangu, serta kawasan timur di Kecamatan Kesugihan [2]. Keberadaan sektor unggulan pada bidang ekonomi dan kependudukan di Kabupaten Cilacap berpotensi dikembangkan untuk mendukung pembangunan. Analisis pertumbuhan ekonomi menurut sektor di wilayah tertentu membantu pembuat kebijakan, tokoh masyarakat, dan peneliti dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang lebih baik [5]. Namun, peran kependudukan dalam pembangunan wilayah Kabupaten Cilacap belum diteliti sehingga dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana potensi sektor ekonomi dan kependudukan dalam pembangunan Kabupaten Cilacap. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis potensi ekonomi dan kependudukan dalam perencanaan pembangunan Kota Cilacap.

2. Metode

Analisis pada penelitian ini menggunakan LQ dan *shift share*. Metode ini sering digunakan untuk mengetahui potensi ekonomi daerah sebagai daya saing wilayah [5,16,17]. Pengukuran LQ dari suatu sektor dalam perekonomian wilayah memiliki dua cara yaitu melalui pendekatan nilai tambah atau PDRB dan tenaga kerja [18]. Analisis LQ bertujuan untuk mengetahui

perbandingan besarnya kontribusi Kabupaten Cilacap terhadap besarnya peranan sektor tersebut pada wilayah Provinsi Jawa Tengah. Adapun rumus analisis LQ adalah sebagai berikut.

$$LQ = \frac{Si/S}{Ni/N}$$

Keterangan:

- LQ : Indeks Location Quotient
Si : PDRB sektor i kabupaten dan kota dalam juta rupiah
S : PDRB total kabupaten dalam juta rupiah
Ni : PDRB sektor i di Provinsi Jawa Tengah dalam juta rupiah
N : PDRB total Provinsi Jawa Tengah

Pengukuran LQ memiliki kriteria yaitu $LQ < 1$ artinya sektor i di kabupaten/kota lebih kecil dari sektor yang sama di Provinsi Jawa Tengah, $LQ = 1$ artinya peranan relatif sektor i di kabupaten/kota sama dengan peranan relatif sektor i di Provinsi Jawa Tengah, dan $LQ > 1$ artinya tingkat spesialisasi sektor i di kabupaten/kota lebih besar dari sektor yang sama di Provinsi Jawa Tengah [19]. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data PDRB tahun 2014 s/d 2018 sehingga untuk mendapatkan indeks LQ selama 5 tahun perlu dibuat rata-rata nilai LQ tahun 2014-2018 tersebut.

Analisis yang kedua adalah *shift share*, analisis ini merupakan salah satu teknik untuk menganalisis ekonomi regional dengan tujuan untuk mengetahui unsur-unsur yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota serta peringkat tingkat pertumbuhannya dibandingkan dengan provinsi [20,21]. Model *shift share* membutuhkan data periode awal dan periode akhir untuk perbandingan ekonomi regional dan nasional atau industri agregat dan industri terpilah [1]. Dengan analisis *shift share* dapat diketahui pertumbuhan regional yang dibagi menjadi tiga komponen yaitu mengukur sejauh mana pertumbuhan wilayah yang dikaitkan dengan pertumbuhan tingkat nasional, kedua adalah pertumbuhan wilayah yang dikaitkan dengan pertumbuhan industri, dan ketiga adalah pertumbuhan ekonomi lokal dimana perusahaan dapat tumbuh lebih cepat atau lambat di tingkat wilayah dibandingkan dengan di luar wilayah [22]. Perbandingan kecepatan perkembangan antar sektor di suatu wilayah dapat diketahui dari hasil analisis ini, selain itu dapat diketahui pula bagaimana tingkat perkembangan suatu wilayah jika dibandingkan dengan wilayah lainnya [23].

Analisis yang ketiga adalah kependudukan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui potensi kependudukan yang meliputi jumlah penduduk dan kondisi penduduk. Analisis kependudukan diperlukan dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar perencanaan. Data analisis kependudukan berupa jumlah dan komposisi penduduk.

3. Hasil penelitian dan pembahasan

3.1. Potensi sektor ekonomi

Keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi sehingga pemerintah berupaya untuk menciptakan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pemerintah mendorong sektor-sektor ekonomi sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini dapat memberikan efek yang besar dan dalam waktu yang singkat. Tabel 1 menunjukkan hasil analisis LQ di mana dapat diketahui sektor ekonomi basis dan non basis di Kabupaten Cilacap.

Tabel 1. Hasil analisis LQ PDRB Kabupaten Cilacap terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 s/d 2018.

No	Sektor	Hasil LQ					Rata-Rata LQ
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,55	0,55	0,55	0,56	0,55	0,55
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,47	1,41	1,18	1,15	1,17	1,28
3.	Industri Pengolahan	2,11	2,14	2,15	2,09	2,04	2,11
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,66	0,69	0,69	0,7	0,56
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,54	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
6.	Konstruksi	0,47	0,48	0,49	0,49	0,49	0,48
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,36	0,37	0,37	0,38	0,38	0,37
8.	Transportasi dan Pergudangan	0,8	0,81	0,81	0,8	0,8	0,81
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,33	0,33	0,32	0,32	0,32	0,33
10.	Informasi dan Komunikasi	0,41	0,42	0,42	0,42	0,44	0,42
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
12.	Real Estate	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
13.	Jasa Perusahaan	0,42	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42
14.	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,4	0,4	0,4	0,41	0,41	0,4
15.	Jasa Pendidikan	0,4	0,39	0,38	0,39	0,39	0,39
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,4	0,41	0,41	0,42	0,42	0,41
17.	Jasa Lainnya	0,46	0,47	0,46	0,46	0,46	0,46

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan masuk kedalam sektor basis dengan nilai LQ 1,28 dan 2,11. Nilai LQ > 1 memiliki arti bahwa komoditas tersebut merupakan basis dan menjadi sumber pertumbuhan dan memiliki keunggulan komparatif. Hasil pada komoditas sektor tersebut tidak hanya memenuhi daerah bersangkutan namun memiliki potensi untuk diekspor keluar wilayah [23].

Sektor yang dapat menumbuhkan sektor lain dimana sektor tersebut memberikan input maupun sektor yang menggunakan produksinya sebagai input dalam proses produksi disebut sebagai sektor unggulan [18]. Sektor unggulan akan sangat berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah karena akan menyebabkan peningkatan pada sektor lainnya dan akan berdampak pada daerah sekitarnya.

Sektor industri pengolahan menjadi sektor yang memiliki kontribusi PDRB terbesar di Kabupaten Cilacap dan hampir memiliki semua jenis bentuk industri pengolahan kecuali industri tembakau. Hal ini dapat dilihat dari data PDRB Kabupaten Cilacap. Dalam kegiatan ekonomi industri, pengolahan merupakan kegiatan mengubah barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, dan atau barang lebih bernilai, dan bersifat lebih dekat dengan pemakai akhir.

Berkembangnya sektor industri di Kabupaten Cilacap berkaitan dengan adanya investasi di bidang industri seperti Pertamina, Holcim, dan PLTU dimana perusahaan besar ini tentunya berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Sektor industri pengolahan menempati peringkat pertama sebagai sektor basis di Kabupaten Cilacap, sektor ini banyak didukung oleh industri semen, minyak goreng, dan industri besar seperti PT. Holcim, Pertamina, Sinarmas, Pelindo dan lainnya yang tentunya sektor ini menyumbang PDRB Kabupaten Cilacap.

Sementara ada 15 sektor lain yang tergolong sektor non basis, hal ini berarti produksi komoditas di Kabupaten Cilacap memerlukan impor dari luar karena tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kegiatan sektor non basis menunjukkan bahwa sektor ini tidak memiliki kontribusi yang tinggi dan keunggulan bersaing yang cukup atau hanya berfungsi sebagai penunjang sehingga diperlukan kebijakan yang lebih mendalam untuk meningkatkan subsektor ini menjadi basis [24]. Salah satu sektor non basis adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang hanya bernilai 0,5. Selain itu, sektor ini sudah tidak lagi menjadi unggulan di Kabupaten Cilacap dan bergeser ke sektor yang lain.

Analisis *shift share* dapat digunakan untuk menganalisis perubahan indikator kegiatan ekonomi seperti produksi dan kesempatan kerja. Analisis *shift share* terdiri dari komponen pertumbuhan nasional (PN), komponen pertumbuhan proporsional (PP) dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah (PPW). Tabel 2 menunjukkan hasil analisis shift share Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan Tabel 2, sektor yang mempunyai nilai pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah sektor pertambangan dan penggalan, di mana sektor ini di Kabupaten Cilacap merupakan sektor andalan yang menyumbang PDRB Provinsi Jawa Tengah dengan nilai tertinggi. Tipologi perkembangan industri maju dan tertekan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Izzudin, Ritohardoyo, dan Muta'ali, hanya ada di dua kabupaten yaitu Kabupaten Cilacap dan Sukoharjo, industri di dua kabupaten ini memiliki kontribusi cukup baik dalam perekonomian wilayah karena memiliki nilai di atas rata-rata nilai provinsi [25]. Berdasarkan hal tersebut dapat kita ketahui bahwa sektor industri lebih menonjol dibanding pertanian sehingga menunjukkan bahwa proses industrialisasi telah terjadi di Kabupaten Cilacap.

Tabel 2. Hasil analisis *shift share* Kabupaten Cilacap tahun 2014 s/d 2018.

No	Sektor	PP	P
		Ri-Ra	ri-Ra
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-10,50%	-6,98%
2.	Pertambangan dan Penggalian	26,95%	2,59%
3.	Industri Pengolahan	-4,85%	-27,20%
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	7,86%	34,94%
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	-13,80%	-17,65%
6.	Konstruksi	8,19%	12,59%
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,92%	6,67%
8.	Transportasi dan Pergudangan	5,60%	11,03%
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,67%	1,68%
10.	Informasi dan Komunikasi	17,28%	19,99%
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	9,31%	15,14%
12.	Real Estate	-67,40%	6,29%
13.	Jasa Perusahaan	-77,40%	28,91%
14.	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-6,28%	-5,81%
15.	Jasa Pendidikan	10,86%	9,50%
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,41%	19,47%
17.	Jasa Lainnya	10,16%	11,64%

Bergesernya sektor basis dari pertanian menjadi sektor lain menunjukkan bahwa setiap daerah selalu berkembang. Secara umum daerah yang awalnya memiliki sektor basis agraris berpotensi untuk mengalami pergeseran ke sektor- sektor yang memiliki daya saing regional [13]. Hal ini juga berkaitan dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah. Kabupaten Cilacap memiliki potensi pertambangan dan penggalian cukup besar, selain itu sektor ini memiliki daya saing regional yang tinggi. Kondisi seperti ini membuat pergeseran sektor basis di Kabupaten Cilacap.

Dengan analisis *shift share* periode tahun 2014 s/d 2018, dapat diketahui sektor-sektor yang mempunyai keunggulan kompetitif dan spesialisasi di Kabupaten Cilacap dengan keterangan adalah PP bernilai positif ($PP > 0$) pada wilayah Kabupaten Cilacap yang berspesialisasi dalam sektor yang secara regional Provinsi Jawa Tengah tumbuh cepat, PP bernilai negatif ($PP < 0$) pada wilayah kabupaten Cilacap yang berspesialisasi dalam sektor yang secara regional Provinsi Jawa Tengah tumbuh lambat, PPW bernilai positif ($PW > 0$) pada sektor yang mempunyai keunggulan komparatif/keuntungan lokasional di wilayah kabupaten Cilacap, dan PPW bernilai negatif ($PW < 0$) pada sektor yang tidak mempunyai keunggulan komparatif/tidak dapat bersaing.

Tabel 3 merupakan hasil analisis *shift share* yang merupakan gambaran tingkat pertumbuhan dan keunggulan komparatif sektor perekonomian Kabupaten Cilacap yang dibandingkan

dengan Provinsi Jawa Tengah. Sektor pertambangan dan penggalian memiliki pertumbuhan tercepat serta sektor yang memiliki keunggulan komparatif tertinggi adalah pengadaan listrik dan gas.

Tabel 3. Kategori tingkat pertumbuhan dan keunggulan komparatif sektor perekonomian Kabupaten Cilacap terhadap Provinsi Jawa Tengah.

No	Kategori	Sektor
1.	Tumbuh cepat	Pertambangan dan penggalian; informasi dan komunikasi; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
2.	Tumbuh Lambat	Jasa perusahaan; real estate; serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang.
3.	Keunggulan komparatif (3 tertinggi)	Pengadaan listrik dan gas; jasa perusahaan; serta informasi dan komunikasi.
4.	Keunggulan komparatif (3 terendah)	Industri pengolahan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; serta pertanian, kehutanan dan perikanan.

Tabel 4. Skala prioritas sektor perekonomian di Kabupaten Cilacap.

No	Sektor	Skor Analisa LQ	Skor Keunggulan Spesialisasi	Skor Keunggulan Komparatif	Total Skor	Prioritas
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan					
2.	Pertambangan dan Penggalian	1	1		2	I
3.	Industri Pengolahan	1			1	
4.	Pengadaan Listrik dan Gas			1	1	
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
6.	Konstruksi					
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
8.	Transportasi dan Pergudangan	1			1	
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum					
10.	Informasi dan Komunikasi		1	1	2	II
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi					
12.	Real Estate					
13.	Jasa Perusahaan			1	1	
14.	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib					
15.	Jasa Pendidikan					
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		1		1	
17.	Jasa Lainnya					

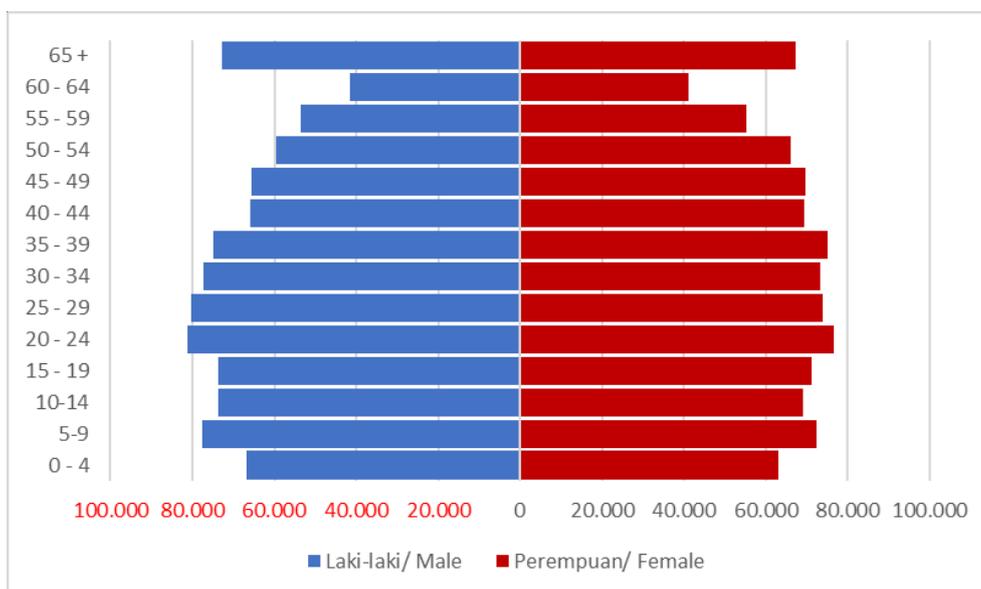
Potensi ekonomi dan identifikasi sektor potensial serta sektor prioritas di Kabupaten Cilacap dapat diketahui dengan melakukan kompilasi hasil analisis LQ dan *shift share*. Hal ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk merumuskan perencanaan pembangunan. Tabel 4 merupakan tabel skala prioritas yang menunjukkan sektor ekonomi prioritas di Kabupaten Cilacap. Dapat ditinjau bahwa sektor perekonomian di Kabupaten Cilacap yang menjadi

prioritas dalam hal penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kedepannya adalah sektor Pertambangan dan Penggalian serta Informasi dan Komunikasi. Dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Cilacap, sektor potensial perlu didorong agar menyumbang peningkatan pendapatan daerah. Masing-masing sektor memiliki peran tersendiri yang dapat mendukung satu sama lainnya. Kontribusi yang besar diberikan oleh sektor ekonomi potensial yang menjadi sektor penggerak perekonomian yaitu sektor yang memiliki keunggulan kompetitif, keunggulan spesialisasi, dan keunggulan komparatif sekaligus pada masing-masing wilayah pengembangan [26].

3.2. Potensi sektor kependudukan

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah erat hubungannya dengan pertumbuhan penduduk, dimana pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan penduduk. Pendidikan berpengaruh penting terhadap tingkat produktivitas penduduk Indonesia sehingga jumlah penduduk yang besar bukan merupakan beban tetapi penunjang pembangunan [27].

Kabupaten Cilacap memiliki luas wilayah 2.124,47 km² dan jumlah penduduk 1.908.867 jiwa serta kepadatan penduduk mencapai 898 jiwa/km². Pada tahun 2018, pertumbuhan penduduk Kabupaten Cilacap mencapai angka 3,3 persen. Komposisi penduduk Kabupaten Cilacap tahun 2018 yang disajikan dalam diagram piramida penduduk pada Gambar 3.



Gambar 3. Piramida penduduk Kabupaten Cilacap tahun 2018 [28].

Berdasarkan Gambar 3 dapat diketahui bahwa komposisi piramida menjadi terbalik dimana penduduk usia 65+ memiliki jumlah lebih banyak dibandingkan usia dibawahnya. Namun penduduk dengan usia terbanyak ada di usia 20 s/d 24 tahun. Selain itu, meskipun jumlah penduduk usia 65+ lebih banyak dibandingkan di bawahnya, penduduk usia produktif relatif masih banyak. Penduduk usia produktif tentunya akan menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Tabel 5. Jumlah penduduk berdasarkan lapangan pekerjaan tahun 2018 di Kabupaten Cilacap [29].

No	Jenis Lapangan Kerja	Jumlah
1.	Pensiunan/ <i>Retired</i>	11.594
2.	PNS, TNI, POLRI/ <i>Government Employees, Military, Police</i>	2.018
3.	Buruh Industri/ <i>Industrial Worker</i>	43.415
4.	Nelayan/ <i>Fisherman</i>	12.966
5.	Buruh Tani/ <i>Farm Worker</i>	229.400

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian lebih banyak dibandingkan dengan sektor lain. Di sisi lain, jika kita bandingkan dengan hasil analisis sektor andalan, sektor pertanian kehutanan dan perikanan tidak termasuk sektor andalan dan bukan prioritas. Namun, sektor pertanian masih menjadi lahan mata pencaharian sebagian besar masyarakat Kabupaten Cilacap.

Sektor-sektor bidang industri yang merupakan sektor andalan menempati posisi kedua dalam penyerapan tenaga kerja dengan jumlah 43.415 orang. Artinya sektor ini belum menyerap tenaga kerja lokal terlalu banyak jika dibandingkan dengan sektor pertanian dan perikanan. Hal ini berkaitan dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia di bidang industri. Kualitas tenaga kerja memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas industri dan nilai tambah produk yang dihasilkan serta juga dapat memperkuat daya saing industri [30]. Saat ini sektor industri masih banyak mendatangkan pekerja dari luar daerah karena kurangnya kapasitas SDM yang memenuhi standar industri di Kabupaten Cilacap.

Tabel 6. Jumlah penduduk usia 10+ menurut pendidikan tertinggi di Kabupaten Cilacap tahun 2018 [31].

No	Pendidikan Ditamatkan	Tahun (dalam %)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Tidak/Belum Perah Sekolah	5,14	5,95	1,87	4,08	4,12
2.	Tidak/Belum Tamat SD	24,50	23,18	24,99	24,12	27,22
3.	Tamat SD	34,38	33,51	33,83	32,97	29,14
4.	Tamat SLTP/Sederajat	19,47	21,10	16,44	21,05	20,70
5.	Tamat SLTA/Sederajat	13,67	12,46	19,17	14,40	15,18
6.	Tamat Diploma/Universitas	2,84	3,81	3,70	3,39	3,64
	Total	100	100	100	100	100

Berdasarkan Tabel 6, jumlah penduduk yang tamat pendidikan tinggi jumlahnya cukup sedikit dibandingkan dengan yang lain. Jumlah penduduk yang tamat SD memiliki jumlah terbanyak pada tahun 2018. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas SDM di Kabupaten Cilacap belum cukup memadai untuk menjadi tenaga kerja di sektor industri. Sektor industri termasuk pertambangan dan penggalian di Kabupaten Cilacap berkembang karena menggunakan tenaga kerja dari luar dan asing. Keterbatasan kapasitas tenaga kerja menyebabkan sektor ini belum maksimal dalam penyerapan tenaga kerja dari penduduk lokal.

Melihat pentingnya kualitas tenaga kerja, pemerintah harus membuat kebijakan dan pengaturan ketenagakerjaan yang menjamin ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas. Meskipun hal ini tidak mudah karena melihat tingkat pendidikan tenaga kerja masih didominasi pendidikan rendah [30]. Untuk itu program pengembangan dan pembangunan Kabupaten Cilacap selain di sektor ekonomi yang memiliki potensi yang cukup baik yang tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di sektor SDM. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Cilacap karena selain meningkatkan perekonomian juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

3.3. Peran sektor ekonomi dan kependudukan dalam pembangunan wilayah Kabupaten Cilacap

Pembangunan wilayah pada dasarnya adalah pemanfaatan segala sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan akan masyarakatnya. Dengan segala potensi seperti ekonomi dan kependudukan yang dimiliki suatu wilayah akan mendukung proses pembangunan wilayah. Kabupaten Cilacap memiliki potensi ekonomi dan kependudukan yang cukup tinggi sehingga pemerintah daerah perlu memanfaatkannya dengan baik agar tercipta pembangunan wilayah untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Kabupaten Cilacap memiliki sektor unggulan dan potensial di bidang ekonomi yang perlu untuk terus dikembangkan yaitu sektor pertambangan serta informasi dan komunikasi. Sebagai upaya percepatan pembangunan ekonomi daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah, pembangunan ekonomi Kabupaten Cilacap dapat dikembangkan melalui pengembangan sektor ekonomi potensial yaitu sektor pertambangan, informasi dan komunikasi. Sektor ini merupakan komoditas unggulan yang paling tinggi perkembangannya karena memberikan kontribusi yang besar dalam PDRB dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) [16]. Dengan sumbangan PAD yang tinggi dari sektor pertambangan serta komunikasi dan informasi akan meningkatkan pembangunan wilayah Kabupaten Cilacap.

Sektor kependudukan memiliki peran yang strategis dalam pembangunan Kabupaten Cilacap. Penduduk merupakan subjek dan objek dari pembangunan. Sebagai subjek, penduduk atau masyarakat Kabupaten Cilacap perlu untuk ditingkatkan kapasitasnya karena menjadi penggerak pembangunan dan sebagai objek, hasil dari pembangunan tersebut harus dapat dinikmati untuk kesejahteraan masyarakat. Gambaran tentang kondisi kependudukan Kabupaten Cilacap sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jumlah penduduk yang sangat besar diikuti dengan kualitas SDM yang memadai dapat menjadi pendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun sebaliknya apabila kualitas SDM rendah maka akan menjadi beban bagi pembangunan wilayah Kabupaten Cilacap. Untuk itu kondisi kependudukan Kabupaten Cilacap pada masa yang akan datang harus diperhatikan dalam proses perencanaan pembangunan.

Jumlah penduduk Kabupaten Cilacap yang mencapai 1,9 juta jiwa dengan usia produktif sebanyak 1,3 juta jiwa (69%) merupakan kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) dan sisanya merupakan kelompok usia tidak produktif. Dengan adanya penduduk usia produktif,

masyarakat menjadi penggerak pembangunan ekonomi dengan bekerja di sektor-sektor unggulan dan potensial maupun sektor lainnya. Namun, hanya dengan kuantitas penduduk di usia produktif saja tidak cukup untuk mendukung pembangunan ekonomi, diperlukan kualitas penduduk atau SDM yang memadai. Hal ini tentunya terkait dengan sektor unggulan dan potensial di Kabupaten Cilacap yaitu pertambangan, informasi dan komunikasi, serta sektor industri. Sektor-sektor ini tentunya membutuhkan kualitas SDM yang tinggi dari segi pendidikan dan kemampuan.

4. Kesimpulan

Sektor ekonomi potensial yang menjadi sektor penggerak perekonomian dengan kontribusi besar (*leading sector*) di Kabupaten Cilacap adalah sektor pertambangan serta informasi dan komunikasi. Selain masuk dalam sektor basis, sektor ini memiliki keunggulan komparatif dan spesialisasi.

Potensi kependudukan sebagai salah satu komponen pembangunan ekonomi Kabupaten Cilacap penting untuk diperhatikan dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Potensi jumlah usia produktif yang tinggi dengan kualitas pendidikan yang masih rendah di Kabupaten Cilacap dapat menjadi penghambat dalam pembangunan. Jumlah penduduk yang banyak belum cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, namun perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM lokal karena Kabupaten Cilacap memiliki sektor unggulan di bidang pertambangan, industri dan telekomunikasi. Potensi kependudukan yang perlu diperhatikan dalam pembangunan wilayah Kabupaten Cilacap adalah struktur penduduk berdasarkan umur yaitu sebanyak 1,3 juta jiwa (69%) merupakan kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) dan sisanya sebesar 30% merupakan kelompok usia tidak produktif. Komposisi penduduk yang tamat SD memiliki jumlah terbanyak pada tahun 2018. Hal ini menggambarkan bahwa kualitas SDM di Kabupaten Cilacap belum cukup memadai untuk menjadi tenaga kerja di sektor industri. Selain itu, penduduk dengan komposisi pekerjaan buruh tani memiliki jumlah terbanyak dibandingkan dengan pekerjaan yang lain.

Untuk meningkatkan perekonomian pengembangan kapasitas sumber daya manusia perlu dilakukan dalam perencanaan kedepan agar penduduk lokal mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar mengingat sektor industri pertambangan dan penggalian menjadi andalan Kabupaten Cilacap. Selain itu, sejalan dengan perkembangan ekonomi, lapangan pekerjaan penduduk di Kabupaten Cilacap yang berubah dari pertanian menuju sektor industri dan jasa perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas SDM dari segi pendidikan dan kemampuan. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam penetapan kebijakan pemerintah daerah.

Sektor kependudukan yang memiliki dinamika dalam aspek kualitas dan kuantitas memiliki peran dalam pembangunan sektor ekonomi. Integrasi sektor kependudukan dalam perencanaan pembangunan dengan peran penduduk sebagai penggerak dan objek pembangunan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduk Kabupaten Cilacap.

Referensi

- [1] Mondal WI. An Analysis of The Industrial Development Potential of Malaysia: A Shift-Share Approach. *J Bus Econ Res* 2009;7:41–6. <https://doi.org/10.19030/jber.v7i5.2289>.
- [2] Pratomo A. Analisis Potensi Pengembangan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Cilacap. *Econ Dev Anal J* 2014;3:13–27.
- [3] Sukirno S. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana; 2006.
- [4] Hughes JT. Local Economic Development and Training. *Manag Res News* 1989;12. <https://doi.org/10.1108/eb028016>.
- [5] Herath J. A Dynamic Shift Share Analysis of Economic Growth in West Virginia. 2010.
- [6] Glasson J. *Pengantar Perencanaan Regional*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI; 1990.
- [7] Chen X, Liu Z, Ma C. Chinese Innovation-Driving Factors: Regional Structure, Innovation Effect, and Economic Development—Empirical Research Based on Panel Data. *Ann Reg Sci* 2017;59:43–68. <https://doi.org/10.1007/s00168-017-0818-5>.
- [8] Soleh A, Maryoni HS. Analisis Sektor Ekonomi Unggulan dan Hubungannya Dengan Kesempatan Kerja dan Investasi di Kabupaten Batanghari. *J Ekon* 2017;7:15–30. <https://doi.org/10.35448/jequ.v7i1.4183>.
- [9] Kuswandi A. Pembangunan Wilayah Secara Berimbang. *J Kybernan* 2012;3:47–53.
- [10] BPS Provinsi Jawa Tengah. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Juta Rupiah), 2019-2021. BPS Provinsi Jawa Teng n.d. <https://jateng.bps.go.id/indicator/157/1740/1/-seri-2010-pdrb-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>.
- [11] Tarp F, Roland-Holst D, Rand J. Economic Structure and Development in an Emergent Asian Economy: Evidence From a Social Accounting Matrix for Vietnam. *J Asian Econ* 2003;13:847–71. [https://doi.org/10.1016/S1049-0078\(02\)00223-3](https://doi.org/10.1016/S1049-0078(02)00223-3).
- [12] Amalia F. Determination of the Regional Economy Leading Sectors in Indonesia. *J Ekon Pembang* 2014;15:19–26.
- [13] Rasulong I, Zaimuddin M. Analysis of Leading Economic Sectors of Soppeng Regency, South Sulawesi Province. *Balanc J Ekon* 2020;16:24–41. <https://doi.org/10.26618/jeb.v16i2.4548>.
- [14] Baransano MA, Putri EIK, Achsani NA, Kolopaking L. Peranan Sektor Unggulan sebagai Salah Satu Faktor dalam Mengurangi Ketimpangan Pembangunan Wilayah di Provinsi Papua Barat. *J Perenc Wil Dan Kota* 2016;27:119–36. <https://doi.org/10.5614/jrcp.2016.27.2.4>.
- [15] Rizki K, Juliprijanto W, Destiningsih R. Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten Magelang Tahun 2012-2017. *Din Dir J Ekon* 2019;1:195–212.
- [16] Puspaningtyas A, Rochmah S, Mindarti LI. Analysis of Local Economic Potential and Competitiveness Economic Sector in Improving Local Economic Development (Study In Batu City). *J Adm Publik* 2013;3:151–6.

- [17] Khusaini M. A Shift-share Analysis on Regional Competitiveness - A Case of Banyuwangi District, East Java, Indonesia. *Procedia - Soc Behav Sci* 2015;211:738–44. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.097>.
- [18] Widodo T. *Perencanaan Pembangunan Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN; 2006.
- [19] Arsyad L. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta; 2002.
- [20] Knudsen DC. Shift-Share Analysis: Further Examination of Models for The Description of Economic Change. *Socioecon Plann Sci* 2000;34:177–98. [https://doi.org/10.1016/S0038-0121\(99\)00016-6](https://doi.org/10.1016/S0038-0121(99)00016-6).
- [21] Tallo AJ, Arianti SP, Abdillah F, Bahri AS, Heryanto S, Fassa F, et al. Typology Analysis and Leading Sector of East Nusa Tenggara Province in 2017. *J Phys Conf Ser* 2018;1114. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1114/1/012122>.
- [22] Kurre JA, Weller BR. Forecasting The Local Economy, Using Time-Series and Shift-Share Techniques. *Environ Plan A Econ Sp* 1989;21:753–70. <https://doi.org/10.1068/a210753>.
- [23] Fajri AC. *Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika dan Strategi Pembangunan*. Malang: UB Press; 2017.
- [24] Suresti A, Tan F, Adrimas, Dinata U. Analysis of the Role of Livestock Sub-Sector in Economic Growth in West Sumatra. *IOP Conf Ser Earth Environ Sci* 2021;715. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/715/1/012013>.
- [25] Izzudin M, Ritohardoyo S, Muta'ali L. *Dinamika Tenaga Kerja dan Aglomerasi Industri Manufaktur di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2015*. Universitas Gadjah Mada, 2018.
- [26] Ma'mun D, Irwansyah S. Analisis Pergeseran Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor Potensial Wilayah Pengembangan. *J Soc Econ Agric* 2013;2:7–28. <https://doi.org/10.26418/j.sea.v2i1.5116>.
- [27] Widarjono A. Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Analisis Kausalitas. *Econ J Emerg Mark* 2006;4:147–69. <https://doi.org/10.20885/ejem.v4i2.6882>.
- [28] BPS Kabupaten Cilacap. *Penduduk Menurut Kelompok Umum/Number of Population by Age Group Tahun 2018 2019*. BPS Kabupaten Cilacap n.d. <https://cilacapkab.bps.go.id/indicator/12/279/1/penduduk-menurut-kelompok-umum-number-of-population-by-age-group.html>.
- [29] BPS Kabupaten Cilacap. *Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama/Population Who Worked by Main Industry 2017-2019*. BPS Kabupaten Cilacap n.d. <https://cilacapkab.bps.go.id/indicator/6/242/1/penduduk-yang-bekerja-menurut-lapangan-usaha-utama-population-who-worked-by-main-industry.html>.
- [30] Yustika AE, Prestyantoko A, Safiun A, Supit AJ, Soetrisno B, Sibarani F, et al. *Tapak Pengembangan Industri Nasional*. Bogor: IPB Press; 2014.
- [31] BPS Kabupaten Cilacap. *Penduduk 10+ Menurut Pendidikan Tertinggi/Percentage of Population Aged 10+ 2018-2020*. BPS Kabupaten Cilacap n.d. <https://cilacapkab.bps.go.id/indicator/28/258/1/penduduk-10-menurut-pendidikan-tertinggi-percentace-of-population-aged-10-.html>.